

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian.**

##### **1. Gambaran Umum Kota Kediri**

###### **a. Aspek Geografi**

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

Secara geografis , Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km<sup>2</sup>. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur

dengan relief tanah yang datar. Di kaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri.

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol

Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih

Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah

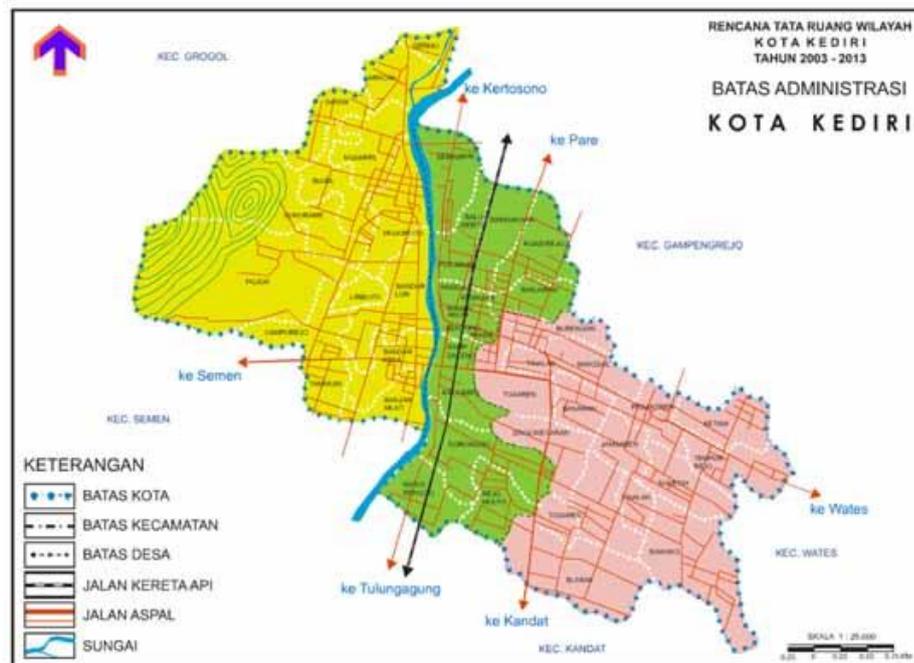
Sebelah Barat : kec. Banyakan dan Kec. Semen.

Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :

Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kelurahan

Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan

Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan.



**Gambar 1. Peta Administrasi Kota Kediri**

Sumber : Kantor Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri

#### **b. Aspek Demografi**

Menurut catatan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Kediri adalah sebesar 4.926 jiwa per km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu mencapai 14,55%. Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kota Kediri Tahun 2012**

NO.	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
1.	<1	2.064	1.846	3.910
2.	1 – 4	9.402	8.822	18.224
3.	5 – 9	12.924	12.312	25.236
4.	10 – 14	11.994	11.318	23.312
5.	15 – 19	10.955	10.497	21.452
6.	20 – 24	11.538	10.781	22.319
7.	25 – 29	14.752	13.691	28.443
8.	30 – 34	15.793	14.355	30.148
9.	35 – 39	13.275	12.317	25.592
10.	40 – 44	12.432	11.546	23.978
11.	45 – 49	10.310	11.342	21.652
12.	50 – 54	9.927	10.216	19.543
13.	55 – 59	7.684	7.774	15.458
14.	60 – 64	5.287	5.498	10.785
15.	>65	9.306	12.973	22.279
JUMLAH		157.043	155.288	312.331

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Data tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kota Kediri terdiri dari 157.043 laki-laki dan 155.288 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 sebesar 4.926 jiwa per kilometer persegi.

### c. **Visi dan Misi Pemerintah Kota Kediri**

Visi pemerintah Kota Kediri adalah ***“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak, dan Tanpa Korupsi”***

Sebagai langkah untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan.
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

## 2. **Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri**

### a. **Profil Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang struktur organisasi, tata kerja lembaga teknis Kota Kediri, bahwa struktur

organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, evaluasi dan pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, yang terdiri dari : Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, yang membawahi : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2013 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 72 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri.

Tugas.

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi.

- a) Penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c) Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal;
- d) Mengadakan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e) Mengadakan koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait dan melaksanakan hubungan kerja dengan dunia usaha ;
- f) Mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, koperasi, usaha mikro. Kecil dan menengah;
- g) Mengadakan pembinaan dan pengembangan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam permodalan dan kemitraan; -Mengadakan pembinaan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h) Pelaksana pemberdayaan koperasi;
- i) Pelaksana pemberdayaan UMKM;
- j) Mengadakan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro dalam wilayah daerah;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Sekretariat

### Tugas

Melakukan koordinasi bidang asilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, penanaman modal, bidang usaha mikro kecil dan menengah, bidang bina lembaga dan usaha koperasi serta melaksanakan ketatausahaan.

### Fungsi.

- a) Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan kerja;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan/anggran dinas;
- c) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protocol dan surat menyurat dinas;
- d) Pengumpulan dan mensistemasan data untuk penyusunan anggaran rutin dan proyek;
- e) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- f) Pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- g) Pelaksanaan penusunan kebijakan penenem modal;
- h) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia koperasi;
- i) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan koperasi dan penanaman modal; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Tugas.

Melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengelolaan asilitasi pembiayaan dan simpan pinjam bagi koperasi, UMKM. Pembinaan pelatihan teknis untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, ketrampilan pengrajin, permodalan/penanaman modal bagi koperasi, industry kecil, UMKM, pengawasan serta pengendalian simpan pinjam bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Fungsi.

- a) Menetapkan kebijakan penanaman modal;
- b) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal berupa kerja sama penanam modal, promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal;
- c) Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan ketrampilan pengrajin untuk koperai, UMKM;
- d) Pembinaan dan peningkatan produktiitas pengusaha, membangun motivasi disiplin dan etos kerja yang profesionak mengarah pada proses produksi efisiensi, efektif, produksi berkualitas;
- e) Memfasilitasi kegiatan distribusi bhan-bahan pokok;
- f) Mengawasi serta mengendalikan simpan pinjam bagi koperasi, UMKM; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tugas.

Melaksanakan bimbingan, pendampingan dalam fasilitasi, ketatausahaan peningkatan pemberdayaan UMKM.

Fungsi

- a) Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data guna bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang manajemen kelembagaan/organisasi, manajemen usaha dan manajemen keuangan UMKM;
- b) Memberikan usulan dan masukan sebagai bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil, menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dan tingkat daerah;
- c) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah;
- d) Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi usaha kecil, menengah di tingkat daerah;
- e) Perumusan pengembangan pola kemitraan dan kewirausahaan; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi.

Tugas

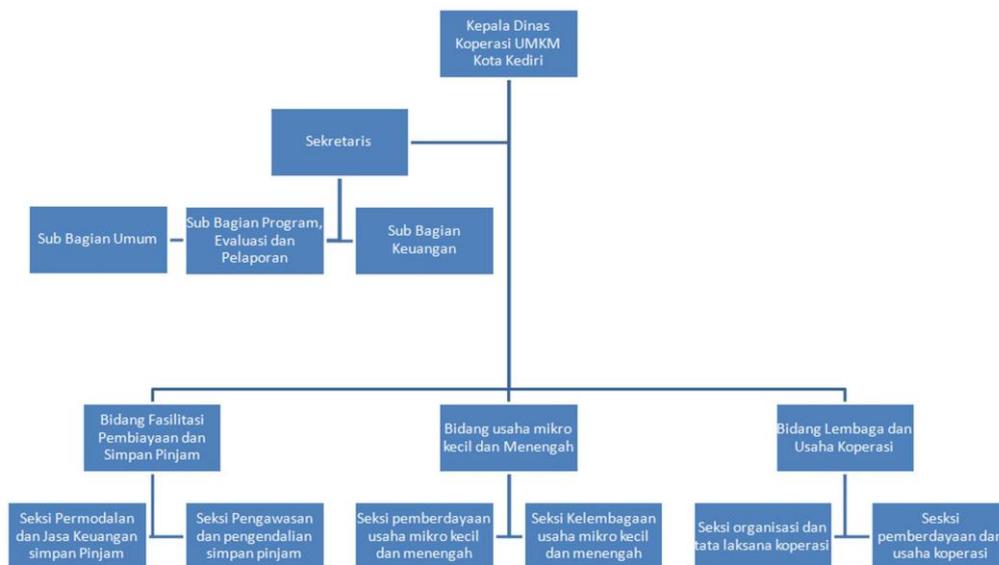
Melaksanakan pembinaan kelembagan, penataan organisasi, tatalaksana, pendidkan dan pelatihan serta pemberdayaan usaha koperasi.

Fungsi.

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang organisasi dan ketatalaksanaan koperasi;
- b) Melaksanakan kebijakan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan koperasi;
- c) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan organisasi, tatalaksana dan usaha koperasi;
- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan usaha koperasi;
- e) Melaksanakan penerangan dan penyuluhan perkoperasian;
- f) Melaksanakan proses pendirian, pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- g) Melaksanakan penilaian pemeringkatan koperasi;
- h) Melaksanakan penilaian dan pengusulan koperasi berprestasi dan penghargaan koperasi;
- i) Melaksanakan proses dan persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k) Melaksanakan kemitraan koperasi;
- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kelembagaan dan usaha koperasi;

- m) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi sesuai perintah dan petunjuk atasan;
- n) Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pelimpahan sesuai petunjuk yang diberikan Kepala Dinas; dan
- o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM sebagai berikut :



**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri**

Sumber : Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri

#### **b. Visi Dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri**

**Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri adalah :**

“Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri Yang Makmur, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Melalui Koperasi dan UMKM”

Berdasarkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM tersebut maka ditetapkan

Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kewirausahaan UMKM untuk menuju keunggulan usaha yang efisien dan kompetitif.
2. Mendorong dan memotivasi kemandirian kelembagaan koperasi.
3. Meningkatkan sistem pendukung usaha untuk memfasilitasi berkembangnya Koperasi dan UMKM.
4. Menciptakan sistem pendukung yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil dan menengah.
5. Meningkatkan promosi dan kualitas untuk menarik kerjasama investasi.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Data Sekunder merupakan data yang diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen-dokumen dan arsip-arsip lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dan Pengusaha Olahan Tahu di Kelurahan Tinalan Kota Kediri.

### **1. Implementasi Kebijakan Publik dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan bidang UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Kediri.**

#### **a. Program Pemberdayaan Yang sudah Dilaksanakan**

Program pengembangan bidang UMKM dan Koperasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2009 merupakan upaya dari pemerintah Kota Kediri dalam menciptakan iklim UKM yang kondusif dimana

setiap UKM yang ada di Kediri dapat berjalan dengan aktif serta dapat membantu terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kota Kediri. Program tersebut diambil oleh para pengambil keputusan di Kota Kediri, termasuk Walikota dan di laksanakan serta dikontrol oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap tumbuh berkembangnya UMKM serta Koperasi yang ada di Kota Kediri, apabila program pemberdayaan tersebut dapat berjalan maka segala kendala-kendala yang dihadapi pasti dapat diatasi dengan baik. Dengan banyaknya UMKM yang ada di kota Kediri maka peran serta semua pihak baik itu pemerintah maupun pengusaha itu sendiri diharapkan dapat bersinergi dengan baik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Heri selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM.

“Terkait dengan UMKM yang saat ini sudah tumbuh berkembang di berbagai daerah termasuk Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri yang dipimpin bapak walikota Abu Bakar berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi yang dilakukan pemerintah daerah juga mengacu pada pemerintah pusat yang di tingkat Kementerian dan Provinsi juga berusaha untuk menggalakkan program UMKM. Sehingga nantinya diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di kota Kediri yang jumlahnya 10.000 lebih.” ( Wawancara tanggal 2 Mei 2016 pukul 10.05 di Dinas Koperasi dan UMKM ).

Dengan meningkatkan program UMKM, sasaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di daerah dan yang belum dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Sehingga UMKM tersebut dapat berkembang. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di Kota Kediri dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Seperti yang diungkapkan

oleh Ibu Ratna, selaku kepala seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

“Saya sangat setuju dengan adanya program pemberdayaan yang di laksanakan oleh pemerintah, baik dari pusat atau pun Kota Kediri sendiri, karena di kota Kediri pertumbuhan UMKM sudah semakin banyak, namun masih banyak pula yang belum dapat berkembang dengan baik, seperti kurangnya kualitas dan produk yang kurang menarik minat konsumen, sehingga diharapkan melalui campur tangan pemerintah usaha mereka dapat memiliki daya saing dan menarik perhatian konsumen”. ( Wawancara tanggal 3 Mei 2016 pukul 10.45 di Dinas Koperasi dan UMKM ).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para pembuat keputusan dalam program UMKM memiliki keinginan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM yang masih belum berkembang, karena masih banyak UMKM yang sudah tumbuh namun belum dapat bersaing dengan UMKM yang sudah ada.

#### **b. Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM**

Program peningkatan ekonomi lokal yang sudah di laksanakan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Pemberdayaan UMKM tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada sinergi dengan dinas atau pelaku UMKM tersebut. Karena apabila pelaku UMKM yang usahanya tidak berkembang tidak adanya program atau strategi baru yang dapat menarik semangat mereka untuk lebih meningkatkan produk-produk yang ditawarkan agar usaha mereka juga dapat bersaing. Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Heri, selaku Kepala Bidang UMKM dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Hasil wawancara sebagai berikut :

”Strateginya adalah kita melakukan kunjungan ke tiap daerah/desa untuk melakukan cek atau pengarahan kepada setiap pelaku UMKM yang ada di daerah, dalam hal ini para petugas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan

pengecekan dan pembekalan tersebut, serta didukung oleh program prodamas yang telah dicanangkan oleh Bapak Walikota, setiap tahunnya kita juga mulai memberikan penghargaan ke setiap pelaku UMKM yang sudah berprestasi dan berhasil dalam mengembangkan usahanya, serta dengan adanya klinik UMKM yang ada di sebelah dinas Koperasi dan UMKM yang dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk dapat bertanya mengenai usahanya baik itu permasalahan permodalan, pemasaran atau pun yang lainnya, klinik tersebut juga menjadi wadah untuk pelatihan bagi setiap wirausahawan baru dan program pelatihan tersebut dilaksanakan setiap bulan” (Wawancara tanggal 2 Mei pukul 10.25 Di Dinas Koperasi)

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan bapak Widy selaku anggota

seksi Pemberdayaan UMKM, berikut hasil wawancaranya :

“Dari pemerintah sudah berusaha untuk memberikan strategi-strategi baru seperti melakukan pengecekan tiap bulan dan memberi pengarahan atau pelatihan kepada mereka untuk membuat para pelaku UMKM yang usahanya masih belum berkembang agar memiliki daya saing dengan para pelaku UMKM yang sudah berkembang sebelumnya, pelatihan tidak hanya untuk para pelaku UMKM yang usahanya sudah ada, namun pelatihan juga ditujukan kepada para wirausahawan baru yang masih akan memulai usahanya, sehingga diharapkan baik pelaku usaha lama maupun baru dapat menjalankan usahanya dengan baik. Dinas koperasi juga berusaha untuk membantu dalam memasarkan produk-produk mereka dengan mengadakan pekan UMKM se-Kediri, acara tersebut melibatkan lebih dari 100 pelaku UMKM yang terdiri dari UMKM makanan dan minuman serta beberapa UMKM yang menjual makanan dan minuman, seperti kerajinan tangan atau pun batik tenun khas Kediri”. ( Wawancara tanggal 3 Mei 2016 pukul 09.30 di Dinas Koperasi Kota Kediri ).

Jadi, dari kedua pernyataan diatas usaha dari pengambil keputusan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM yang ada di daerah sudah dilaksanakan tiap bulannya serta membantu untuk memasarkan produk-produk mereka agar setiap pelaku UMKM yang usahanya masih kala bersaing atau wirausahawan baru dapat meningkatkan kualitas usahanya dan mempersiapkan usahanya dengan baik sehingga dapat bersaing dengan usaha yang sudah ada.

### c. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku UMKM

Proses pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Kediri tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh Masyarakat dan Pelaku UMKM itu sendiri. Dikarenakan dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM pemerintah tidak serta merta dapat berjalan sendiri dan membutuhkan sinergi dengan masyarakat atau pelaku UMKM sendiri. Sinergi dengan masyarakat dan pelaku UMKM tersebut dirasakan sangat berpengaruh oleh pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Ratna selaku anggota seksi pemberdayaan UMKM, berikut pernyataannya :

“Peran serta masyarakat penting sekali untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Kota Kediri, karena masyarakat secara tidak langsung akan berperan sebagai konsumen terhadap produk tersebut, dengan adanya peran serta masyarakat, pemerintah berharap bahwa masyarakat lebih banyak membantu proses pengembangan UMKM tersebut dengan membeli produk UMKM dan sadar bahwa produk-produk yang di tawarkan oleh UMKM tidak kalah kualitas dengan produk asing, pemerintah juga berusaha untuk mengenalkan produk-produk unggulan UMKM yang ada di Kota Kediri dengan diadakannya pekan UMKM se Kediri, harapannya dengan diadakannya pekan UMKM tersebut masyarakat dapat lebih mengenal produk-produk UMKM yang ada di daerahnya”. (Wawancara tanggal 3 Mei 2016 pukul 10.55 di Dinas Koperasi)

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Bapak Agus selaku anggota Seksi Pemberdayaan UMKM, berikut pernyataannya :

“ pemerintah Kota Kediri memang mulai melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Kota Kediri, dimulai dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi gagasan Bapak Walikota, dinas Koperasi pun juga berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan UMKM, agar masyarakat juga dapat membantu dalam proses pengembangan Kota Kediri dan mereka juga berperan sebagai aktor dari pengembangan itu sendiri, diharapkan dengan adanya peran serta masyarakat dapat memberikan masukan atau solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang menjadi target pemberdayaan dinas Koperasi dan UMKM”. ( wawancara tanggal 3 Mei 2016 pukul 12.30).

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pengambil keputusan tertinggi juga berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan yang ada di Kota Kediri. Pemerintah tidak hanya berperan

sendiri dalam proses pengembangan program pemberdayaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM, tetapi mereka juga melibatkan masyarakat yang juga berperan sebagai konsumen. Sehingga nantinya diharapkan dengan keterlibatan masyarakat juga dapat memberikan solusi atau masukan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan untuk menjalankan program selanjutnya yang ada di Kota Kediri berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.

## **2. Faktor yang mendukung atau menghambat proses pemberdayaan UMKM.**

Setelah dijabarkan dan dijelaskan diatas terkait dengan program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri berdasarkan Perda no.4 tahun 2009 tentang pemberdayaan UMKM. Meskipun sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan ketika proses pemberdayaan tersebut berjalan. Oleh sebab itu dibagian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi local di Kota Kediri, yaitu :

### **a. Faktor Pendukung**

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No.4 tahun 2009 tentang pemberdayaan UMKM Kota Kediri, Dinas Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab atas seluruh UMKM yang ada di Kota Kediri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Maka ada

beberapa hal yang mendukung dilaksanakannya kebijakan tersebut, beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Tersedianya Sarana dan Pra Sarana

Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan sarana dan pra sarana yang baik, begitu juga dengan kebijakan pemberdayaan UMKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kediri. Sarana dan pra sarana yang dimaksud disini adalah Klinik UMKM yang lokasinya berada di sebelah kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Klinik UMKM tersebut menjadi sarana utama dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri untuk memberdayakan UMKM yang ada. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Heri selaku Ketua Bidang UMKM, berikut pernyataannya :

“ Keberadaan Klinik UMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM baik itu yang sudah berjalan atau belum. Jadi para pelaku UMKM dapat langsung bertanya-tanya mengenai usaha yang mereka miliki dan dapat dibantu dengan petugas yang sudah ada. Klinik UMKM tersebut juga berguna untuk memberikan pelatihan bagi para wirausahawan baru agar dapat mempersiapkan produknya.” ( Wawancara 2 Mei pukul 10.35 di Dinas Koperasi).

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari didirikannya Klinik UMKM adalah sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk berkonsultasi atau mencari bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi usahanya.

2. Tersedianya Tenaga Kerja yang siap

Kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh tenaga kerja yang sudah siap dan berpengalaman di bidangnya. Maka dari itu Dinas Koperasi dan UMKM juga sudah menyediakan tenaga kerja yang siap untuk membantu para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Seperti apa yang

telah disampaikan oleh Bapak Heri selaku Ketua Bidang UMKM, berikut pernyataannya :

“ Dari segi tenaga kerja kita sudah mempersiapkan dengan baik, tujuannya adalah agar mereka dapat membantu setiap pelaku UMKM yang sedang berkembang atau yang akan memulai usahanya, bahkan kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang hanya siap di Klinik UMKM atau dinas saja, namun kita juga sudah membagi beberapa kelompok untuk para pegawai tersebut dapat terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana proses pengembangan UMKM yang dilakukan oleh para pelaku UMKM” (Wawancara 2 Mei pukul 10.40 di Dinas Koperasi).

Dari pernyataan diatas sudah dijelaskan bahwa tenaga kerja sudah disiapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu dalam proses kebijakan yang sedang dijalankan, bahkan untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan

#### **b. Faktor Penghambat**

Dalam suatu kebijakan selain adanya faktor pendukung pasti ada pula faktor yang dapat menghambat berjalannya kebijakan tersebut. Dalam kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kota Kediri beserta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri pun tidak terlepas dari adanya hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Heri selaku ketua Bidang UMKM, berikut pernyataannya :

“ Dalam proses menjalankan kebijakan tersebut, dinas Koperasi dan UMKM selaku dinas yang bertugas untuk melaksanakan dan melakukan member check kerap mendapat hambatan berupa kurangnya koordinasi dengan para pelaku UMKM, misalnya dalam penyuluhan terhadap UMKM yang sedang berkembang para pelaku UMKM terkadang masih belum paham terhadap program yang telah dijelaskan oleh petugas, sehingga petugas harus memberikan penjelasan secara pribadi kepada para pelaku UMKM tersebut agar lebih paham dengan maksud dan tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas. Namun hal tersebut bukanlah menjadi persoalan yang besar karena setiap petugas sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan mampu untuk menjelaskan ke setiap pelaku UMKM yang mungkin sulit untuk memahami program yang sedang dijalankan” (Wawancara tanggal 2 Mei pukul 11.00 di Dinas Koperasi dan UMKM)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku UMKM dapat memahami akan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM karena para pelaku UMKM tumbuh dari berbagai macam latar belakang. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Ratna selaku anggota seksi pemberdayaan UMKM, berikut pernyataannya :

”Dalam hal koordinasi antar petugas sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun ketika petugas terjun langsung ke lapangan kadang kala menemui kesulitan bila memberikan penjelasan kepada para pelaku UMKM yang sudah berusia lanjut, maka dari itu para petugas sudah diberikan pelatihan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, karena koordinasi antara petugas dan pelaku UMKM sangat penting untuk proses pengembangan UMKM tersebut agar tidak ada salah komunikasi dalam pelaksanaannya” (Wawancara tanggal 3 Mei pukul 11.30 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri).

Dengan usaha dan program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM demi terwujudnya tujuan dari pengembangan UMKM agar setiap pengusaha UMKM dapat menjalankan usahanya dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan agar program yang telah dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tingkat ekonomi di Kota Kediri meningkat.

### **C. Analisis Pembahasan**

**1. Implementasi Kebijakan Publik dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan bidang UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Kediri.**

**a. Implementasi Kebijakan Publik melalui Program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Serta bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Jadi untuk menumbuhkan perekonomian di daerah pemerintah selaku pemegang kekuasaan berupaya untuk memberikan implementasi kebijakan dalam meningkatkan tingkat ekonomi yang ada di daerah, salah satunya melalui program pemberdayaan UMKM yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008. Program tersebut sudah berjalan baik di beberapa daerah, meskipun masih ada hambatan yang di hadapi oleh pemerintah. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah, pemilik modal ataupun masyarakat. Dengan kondisi tersebut pemegang kekuasaan berupaya untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakannya agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Implementasi kebijakan harus dilaksanakan dengan baik apabila tujuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian lokal dapat terwujud. Menurut

Gerorge C. Edward dalam Subarsono (2008:89) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu :

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

d) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi adalah *Standart Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilihat dari poin yang pertama yaitu komunikasi dapat dikatakan bahwa peran serta pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pengarahan kepada pelaku UMKM sudah berjalan efektif dan maksimal, melalui klinik UMKM yang didirikan dapat menjadi sarana bagi para pelaku UMKM untuk berkonsultasi mengenai usahanya, klinik UMKM tersebut juga berguna untuk para pelaku usaha baru yang akan memulai usahanya agar mendapatkan pelatihan sebelum mereka siap untuk memulai usahanya. Sedangkan untuk poin sumberdaya, dinas koperasi dan UMKM sudah memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM tersebut, dengan adanya petugas yang ada ada di klinik UMKM dan beberapa petugas yang dibagi beberapa kelompok untuk melakukan observasi ke lapangan dapat mendukung tercapainya target dari pemberdayaan UMKM tersebut. Mereka juga sudah dibekali pelatihan sebelum menjalankan tugasnya agar apabila ada hambatan seperti target yang sulit menangkap apa yang disampaikan oleh petugas dapat dijelaskan dengan lebih baik. Kemudian untuk selanjutnya adalah disposisi, hal ini sudah menjadi fokus dari dinas koperasi dan UMKM dalam membagi para petugas yang akan terjun ke

lapangan atau yang bertugas di klinik UMKM tersebut, perbedaan watak yang ada di setiap petugas sudah diatasi dengan memberikan pelatihan sebelum mereka terjun ke lapangan dan menjalankan tugasnya, hal ini sangat penting agar ketika para petugas sudah mulai terjun ke lapangan tidak membuat para pelaku UMKM merasa tidak nyaman apabila diberikan pengarahan oleh para petugas. Selanjutnya adalah struktur birokrasi, dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM sudah membagi struktur organisasinya dengan baik, para petugas yang bertanggung jawab untuk mewadahi UMKM sudah ditunjuk, dari ketua yang menjadi kepala dan penanggung jawab, seksi kelembagaan UMKM serta seksi pemberdayaan UMKM, serta anggota yang bertugas untuk membantu dalam pelaksanaan program-program yang sudah terencana.

Dari keempat tipe implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas koperasi dan UMKM Kota Kediri sudah berusaha untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM dengan baik, dibuktikan dengan dilaksanakannya keempat tipe implementasi tersebut. Keberhasilan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal di bidang UMKM dapat terwujud apabila keempat variabel tersebut dijalankan dengan baik.

#### **b. Strategi Pengembangan Program UMKM**

Kebijakan program pemberdayaan atau pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan dengan baik apabila tidak didukung dengan cara atau strategi yang baik maka pelaksanaannya tidak akan optimal dan tidak sesuai dengan target. Dinas koperasi dan UMKM Kota Kediri sudah berupaya untuk mengembangkan program unggulan UMKM yang ada di

Kota Kediri melalui berbagai cara, baik berupa kebijakan, acara yang diselenggarakan khusus untuk UMKM atau fasilitas penunjang untuk memberikan pelatihan kepada setiap pengusaha yang ingin memulai melakukan usahanya. Dinas koperasi dan UMKM selaku pengambil keputusan dalam kebijakan yang diterapkan dalam proses pengembangan UMKM di Kota Kediri sudah melaksanakannya berdasarkan prinsip dan tujuan pengembangan UMKM,

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara proses pengembangan yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri sudah berjalan dengan baik berkaitan dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh Dinas yang terkait. Dari dinas Koperasi dan UMKM serta para pelaku UMKM sudah melakukan sinergi dengan baik dalam mengelola produk UMKM yang menjadi usaha mereka. Dengan diciptakannya klinik UMKM yang menjadi wadah untuk para pelaku UMKM

menjalankan usahanya adalah salah satu bentuk nyata dari terlaksananya kebijakan tersebut.

Berdasarkan prinsip dan tujuan pengembangan UMKM yang pertama yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri adalah setiap pelaku UMKM berusaha mengembangkan setiap usahanya dengan kemampuan atau ide mereka sendiri namun tetap mendapatkan pengarahan dari Dinas terkait dengan mengedepankan asa kebersamaan untuk proses pengembangan UMKM tersebut. Prinsip yang kedua perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan adalah dengan memberikan kebijakan yang nantinya dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Kediri, setiap pelaku UMKM mendapatkan perhatian yang sama dalam mengembangkan usahanya. Prinsip yang ketiga pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, jadi pengembangan yang dilakukan juga berupaya untuk melihat produk asli daerah yang berbeda dengan daerah lainnya dan berpotensi untuk menjadi produk unggulan dari Kota Kediri, menjadikan produk asli daerah sesuai dengan orientasi pasar dan menjadikan produk asli daerah bisa berkembang dan bersaing dengan produk lainnya. Prinsip yang keempat peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan adanya strategi dan cara pengembangan produk UMKM diharapkan produk UMKM yang ada di Kota Kediri menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan produk UMKM dari daerah lain, hal tersebut sudah dilaksanakan dan sejauh ini bisa dinilai

berhasil dengan adanya festival UMKM setiap tahunnya adalah salah satu bentuk usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dalam meningkatkan UMKM yang ada di Kota Kediri, dan sejauh ini berdasarkan wawancara dengan para pelaku UMKM usaha tersebut sudah berjalan dengan baik dan usaha mereka dapat berkembang serta memiliki daya saing dengan produk UMKM dari daerah lainnya. Prinsip yang kelima penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan sudah berupaya melakukannya dengan baik dengan adanya klinik UMKM yang ada di sebelah kantor Dinas koperasi dan UMKM dinilai sangat membantu proses pengembangan UMKM yang ada di Kota Kediri.

### **c. Peran serta masyarakat dan pelaku UMKM**

Dalam meningkatkan ekonomi lokal di bidang UMKM yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMKM melibatkan banyak pihak yang membantu agar terlaksananya program tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri juga melibatkan banyak elemen untuk membantu dalam proses kebijakan tersebut, melalui klinik UMKM dan penjangkauan secara langsung terhadap para pelaku UMKM dan masyarakat yang ada di sekitar pelaku UMKM tersebut.

Teori George C. Edward (Subarsono 2008;89) mengemukakan bahwa dalam sebuah kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan di daerah tersebut.

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam

kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan memperlihatkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap produk UMKM yang ada di Kota Kediri sudah baik begitu juga dengan produk olahan tahu yang ada di kelurahan Tinalan Kota Kediri yang sekarang sudah mulai bertumbuh dengan baik. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM berusaha melibatkan masyarakat demi memajukan ekonomi lokal di bidang UMKM agar masyarakat yang juga sebagai konsumen dari produk UMKM tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

Dan bagi para pelaku UMKM khususnya pengusaha olahan tahu yang ada di kelurahan Tinalan Kota Kediri dengan adanya sinergi dengan masyarakat dapat membantu untuk meningkatkan hasil produksi mereka dan membantu dalam memasarkan produk mereka melalui Pasar UMKM yang rutin dilaksanakan oleh pihak dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

## **2. Faktor yang mendukung atau menghambat proses pemberdayaan UMKM.**

Masyarakat Kota Kediri yang mayoritas masih berada di kalangan menengah kebawah mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan ekonomi daerah. Seperti yang diungkapkan oleh (Islamy, 1991 : 20-21),

kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Salah satu kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri adalah pengembangan UMKM sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi daerah dijadikan alat oleh pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Melalui UMKM yang menjadi alat untuk meningkatkan ekonomi lokal, namun di dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa hambatan dan dukungan yang dihadapi oleh pemerintah.

#### a. **Faktor Pendukung**

Program pemerintah dapat berjalan dengan optimal apabila ada faktor yang mendukung dalam berjalannya program tersebut. Melalui program peningkatan ekonomi lokal di bidang UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam Teori Welmer dan Vining (Subarsono 2006;1043) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu :

- 1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik,

ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.

- 3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Jadi beberapa faktor pendukung yang ada diatas sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pada poin pertama tentang logika kebijakan apabila dikaji dari tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Poin 1 sudah menjadi pertimbangan dari para pelaku kebijakan untuk mengembangkan program UMKM dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal yang ada di Kota Kediri yang mayoritas masyarakatnya masih berada dalam golongan menengah ke bawah. Sedangkan untuk poin yang 2 dan 3 dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi juga oleh lingkungan dan kemampuan implementor. Faktor lingkungan yang sangat mendukung dengan banyaknya produk UMKM andalan yang ada di Kota Kediri berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Khususnya apabila melihat Kota Kediri yang sangat khas dengan tahunya, menjadikan alasan tersebut sebagai tolak ukur Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kebijakannya. Kemampuan implementor dengan adanya klinik UMKM, mengadakan pasar UMKM, dan penyuluhan langsung ke setiap kelurahan untuk memberikan pelatihan juga sudah

cukup baik dalam upaya pemerintah Kota Kediri melalui dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal di Kota Kediri. Jadi dengan adanya faktor pendukung tersebut diatas dapat dikembangkan atau dipertahankan untuk tahun selanjutnya agar tujuan dari peningkatan ekonomi lokal di bidang UMKM tersebut dapat berjalan lebih baik lagi.

**b. Faktor Penghambat**

a. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat terhambat bila adanya pihak yang sulit untuk diajak bersinergi bersama, menurut Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Subarsono 2008;89) adanya tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk. Dinas Koperasi dan UMKM menghadapi beberapa masalah berkaitan dengan penyuluhan dengan para pengusaha UMKM yang sudah berusia lanjut, bila dikaji dengan teori George C. Edward (Subarsono 2008;89) yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan juga dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dari implementor ke sasaran yang menjadi target kebijakannya. Harus ada upaya lebih dari para implementor untuk memberikan penyuluhan terhadap para pelaku UMKM yang sudah berusia lanjut, hal ini juga berkaitan dengan disposisi yang menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau

cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. Dengan memberikan pelatihan kepada setiap petugas untuk dapat berkomunikasi dengan baik terhadap para pelaku UMKM yang sudah berusia lanjut.